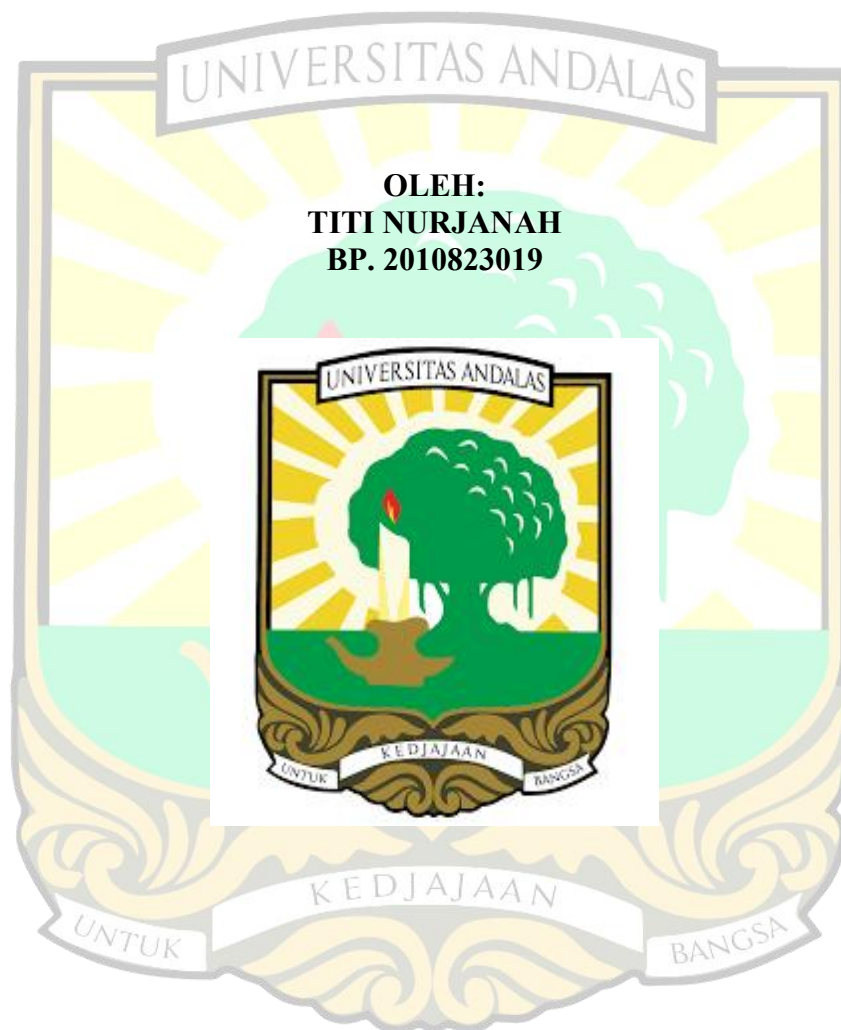


**PROBLEMATIK DALAM PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA PANTAI
PADANG**

SKRIPSI



**OLEH:
TITI NURJANAH
BP. 2010823019**

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DA ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Titi Nurjanah, 2010823019, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2025. “Problematic Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Pantai Padang”, Pembimbing I Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si dan Pembimbing II Prof. Dr. Lucky Zamzami, S.Sos, M.Soc, Sc.

Penelitian ini mendeskripsikan problematik penataan dan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Padang. Permasalahan penelitian ini yaitu Mengapa Pedagang Kaki Lima kurang mematuhi penataan dan relokasi Pemerintah Kota Padang di kawasan Pantai Padang sehingga bisa menjadi suatu problematik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa pedagang kaki lima kurang mematuhi penataan dan relokasi yang dilakukan pemerintah sehingga bisa menimbulkan suatu problematik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi literatur. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis datanya dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini penataan dan relokasi pedagang kaki lima di Pantai Padang dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Pantai Padang sebagai destinasi wisata, adanya penguasaan ruang publik dan fasilitas umum, dan adanya peraturan daerah. Dalam strategi dan pelaksanaannya, pemerintah melakukan himbaudan dan sosialisasi terkait adanya penataan dan relokasi. Pemerintah melakukan penataan dan relokasi di mulai dari Pujasera, Penataan di sepanjang Jalan Samudera, Lapau Panjang Cimpago, dan Pusat Kuliner Pantai Padang. Setelah adanya dilakukan penataan dan relokasi pemerintah melaksanakan pengawasan yang mana saling berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dan pembentukan satgas Satpol PP.

Penataan dan relokasi yang dilakukan pemerintah tidak berujung baik, karena menimbulkan suatu problematik baik bagi pemerintah maupun pedagang kaki lima. Problematic dari pemerintah muncul ketika pedagang tidak mau ditata dan di relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, sedangkan problematik pedagang muncul ketika lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan pedagang kaki lima. Problematic dalam penataan dan relokasi ini menimbulkan adanya ketidakpatuhan oleh pedagang kaki lima dalam penataan dan relokasi. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari adanya sikap apatis pedagang kaki lima, faktor ekonomi, adanya aturan yang tidak jelas, dan kelemahan tempat relokasi dan penataan untuk para pedagang kaki lima.

Kata Kunci: Problematic, Penataan dan Relokasi, Pedagang Kaki Lima (PKL)

ABSTRACT

Titi Nurjanah, 2010823019, Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2025. "Problematics in Arranging Street Vendors in the Padang Beach Tourism Area", Supervisor I Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si and Supervisor II Prof. Dr. Lucky Zamzami, S. Sos, M. Soc, Sc.

This research describes the problems of structuring and relocating street vendors in the Padang area. The problem of this research is why street vendors do not comply with the Padang City Government's arrangement and relocation in the Padang Beach area so that it can become problematic. The aim of this research is to explain why street vendors do not comply with the government's arrangements and relocation which can cause problems.

This research uses a qualitative case study research method with data collection techniques of observation, interviews, literature study. The informant selection technique uses purposive sampling technique. Data analysis involves the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. And uses Max Weber's theory of social action.

Based on the findings in this research, the arrangement and relocation of street vendors on Padang Beach was motivated by the designation of Padang Beach as a tourist destination, the control of public space and public facilities, and the existence of regional regulations. In its strategy and implementation, the government carries out appeals and outreach regarding structuring and relocation. The government carried out arrangements and relocations starting from the Pujasera, arrangements along Jalan Samudera, Lapau Panjang Cimpago, and the Padang Beach Culinary Center. After the arrangement and relocation were carried out, the government carried out supervision in mutual coordination with the relevant agencies and the formation of a Satpol PP task force.

The arrangement and relocation carried out by the government did not end well, because it created problems for both the government and street vendors. Problems from the government arise when traders do not want to be organized and relocated to places provided by the government, while problems for traders arise when the locations provided by the government do not match the expectations of street traders. This problem in arrangement and relocation has led to non-compliance by street vendors in arrangement and relocation. This non-compliance is caused by several factors, starting from the apathetic attitude of street vendors, economic factors, unclear regulations, and weaknesses in relocation and arrangement for street vendors.

Keywords: Problems, Arrangement and Relocation, Street Vendors (PKL)